



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pemerintahan di tingkat Provinsi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 fungsi yaitu : informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik maupun menerima untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai.

Dari delapan puluh tiga (83) indikator kinerja utama Gubernur Tahun 2015, menunjukkan bahwa **capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sangat tinggi**, karena 73 dari 83 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dengan 56 indikator dengan capaian $\geq 100\%$ dan 5 indikator

memenuhi kriteria tinggi, 3 indikator dengan kriteria sedang dan 2 indikator dengan kriteria rendah.

Pencapaian 71 IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 91\%$. Sebanyak 17 IKU diantaranya memiliki kinerja sangat tinggi (91-100) yaitu PDRB atas dasar harga konstan, Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Laju pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah koperasi aktif, Pertumbuhan PAD, Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang, Tingkat Rumah Layak Huni, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, APK SMA/SMK/MA/ Paket C, Jumlah PMKS yang ditangani, Tingkat pengangguran terbuka, Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk dan Indeks demokrasi.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih ($\geq 100\%$) yang menunjukkan efisiensi anggaran untuk tahun 2015 sebanyak 56 IKU yaitu Indeks gini, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita (berlaku), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan Ekspor, Jumlah UMKM, Jumlah Wisatawan Nusantara, Jumlah Wisatawan Mancanegara, Kemantapan Jalan Provinsi, Kondisi Jaringan Irigrasi dan Bangunan Pelengkap yang Terpelihara, Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air lainnya dari Kebutuhan yang Akan Dibangun, Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Masyarakat terhadap Air Minum Layak, Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh, Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Lingkungan Sehat, Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga, Angka melek huruf, APK SMP/MTS/Paket B, Angka rata-rata lama sekolah, Angka Kelulusan, Angka melanjutkan SMA – PT, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 lahir hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, Prevalensi Balita Kurang Gizi, Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate), Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun, Angka Kesakitan DBD, Cagar budaya dan Aset Daerah yang Bernilai Budaya yang Diperlihara, Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum, Persentase Penduduk Miskin, Rasio ketergantungan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penempatan Transmigrasi ke luar Lampung, Fasilitas yang Dibangun di Kawasan KTM sebagai Embrio Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Jumlah SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG), Perempuan Keluarga Miskin Pedesaan, Jumlah Kab/Kota layak anak se-Provinsi Lampung,



Penanganan Kasus Perempuan dan anak, Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional, Jumlah Rumusan Kebijakan (*policy paper*) Pembangunan Daerah yang Aplikatif, Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah Melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi *Roadmap* Sida, Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar, Menurunnya Tingkat Pencemaran Air, Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Mangrove, Jumlah Raperda dan Pergub yang Dihasilkan, Penyelesaian Kasus Tanah, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaikan, Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas SKPD Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan, Konsistensi antar dokumen perencanaan, Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 1-10) dan Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang **tinggi** ataupun **sangat tinggi**. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sedangkan, 10 indikator kinerja lainnya realisasinya di bawah 91% ($\leq 91\%$) yaitu pertumbuhan ekonomi, Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku, Angka melanjutkan SMP – SMA, APM SMA/SMK/MA/Paket C, Angka kesakitan positif malaria (API), Jumlah sanggar kesenian, Indeks kedalaman kemiskinan, Indeks keparahan kemiskinan, kelompok pemuda yang dilatih sebagai Kader Kewirausahaan dan Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER.

Evaluasi atas data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait sanggar kesenian, kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan, penurunan kemiskinan (ketimpangan) serta perusahaan yang menjadi peserta PROPER. Peran Pemerintah diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh



berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan. *Kedua*, hal ini diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kab/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Lampung maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran yaitu terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah serta meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Koordinasi dan sinergi menjadi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama.

Persoalan ketimpangan pendapatan misalnya, tidaklah hanya cukup diselesaikan dengan program pemerintah saja, namun juga sangat membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan inisiatif masyarakat dan juga dunia usaha. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2015 – 2019 dan RKPD 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk seperti : Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal dengan Sistem Informasi Perencanaan (<http://bappeda.lampungprov.go.id>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dan



Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id berfungsi mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS), Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Inovasi di bidang keuangan telah dikembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada azas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem aplikasi ini meliputi penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah provinsi Lampung. Sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui Sistem Aplikasi Pelaporan (www.monev-apbd.Lampungprov.go.id) yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan program/kegiatan pembangunan terhadap penyerapan APBD Provinsi Lampung baik berupa realisasi keuangan dan capaian kinerja yang bersumber dari dana APBD pada setiap SKPD.

Selain itu, inovasi di bidang lain yaitu Inovasi bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Keliling yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan kesehatan terutama siaga bencana. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Keliling tersebut berupa pelayanan : operasi, pemeriksaan laboratorium, Radiologi dan pemulihan pasien (*Recovery*), selain itu pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) berbasis *web* sehingga terwujudnya penyediaan data pegawai yang cepat dan akurat dengan membangun *Executive Information System* (EIS) SIMPEDU yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyajian dan pelaporan data kepegawaian khususnya bagi eksekutif (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan pejabat lain yang berwenang menangani data kepegawaian) serta adanya Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) berbasis Web SIGA www.siga.bp3a.lampungprov.go.id yang merupakan aplikasi untuk menampung data terpilah gender secara terpusat dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengelolanya.

Di luar IKU, pencapaian kinerja pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pembangunan manusia. Ini mencakup antara lain adalah pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tren dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pencapaian IPM dan IPG di Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan yang positif. Untuk capaian tujuan MDGs dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) tujuan yang telah berhasil dicapai; (b) tujuan yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada atau sebelum tahun 2015 (*on track*); dan (c) tujuan yang masih memerlukan upaya yang keras untuk mencapainya. Tujuan dan target indikator MDGs yang telah tercapai adalah MDGs 1 – yaitu: 1) Indeks kedalaman kemiskinan, 2) Laju PDRB per tenaga kerja, dan 3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; MDGs 3 – yaitu: 1) Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, 2) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun, dan 3) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD; MDGs 6 – yaitu: 1) prevalensi HIV/AIDS, 2) Penggunaan kondom pada hubungan berisiko tinggi, 3) Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral, 4) Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria, 5) Angka kejadian dan tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk); MDGs 7 - yaitu: 1) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dan 2) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar.

Tujuan dan target indikator MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (*on track*) yaitu: MDGs 2 – yaitu: 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dan 2) Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun; MDGs 3 – yaitu: 1) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI, dan 2) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; MDGs 5 – yaitu: 1) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, 2) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR), 3) Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4), dan 4) Unmeet KB; MDGs 6 – yaitu: 1) Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, 2) Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS.

Tujuan dan target indikator MDGs yang sulit tercapai di Tahun 2015 dan perlu perhatian khusus meliputi: MDGs 1 – yaitu: 1) Persentase/penurunan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2015, 2) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga



terhadap total kesempatan kerja, 3) Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, 4) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (1.400 kkal/kapita/hari dan 2.000 kkal/kapita/hari). MDGs 4 – yaitu: 1) Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, dan 2) angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup. MDGs 5 – yaitu: 1) Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. MDGs 6 – yaitu: 1) Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi program DOTS, 2) Angka kesakitan dan kematian karena DBD. MDGs 7 – yaitu: 1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan, 2) Jumlah emisi karbondioksida, 3) Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO), 4) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan baru, dan 5) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Sebagai tambahan informasi dilaporkan pula tentang beberapa penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Anugerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Budhipura dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2015 atas prestasi dalam pembangunan sistem inovasi daerah (SIDa) hingga menghasilkan produk-produk atau jasa inovasi diberikan saat puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional XX tahun 2015, di Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta.
2. Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Tahun 2015 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Pelabuhan Perikanan Teladan ke-II Tingkat Nasional Tahun 2015. Diberikan di Gedung Mina Bahari III pada tanggal 11 Desember 2015.
3. Penghargaan Anugerah Bagi Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016 dari Presiden Republik Indonesia atas apresiasi pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sebagai daerah berprestasi nomor 4 (empat). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 14 Desember 2015.



4. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, 21 Desember 2015.
5. Penghargaan Anugrah Desa Membangun Indonesia dari Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Pembina Provinsi terbaik ke 3, atas dukungan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan melalui Gerakan membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015.
6. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan dalam melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara secara Cepat, Akuntabel dan Transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bermartabat.